Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Rahmiyati Mii¹, Mohamad Reza², Firman Latuda³

¹Universitas Gorontalo

^{2,3}Universitas Negeri Gorontalo

Email; miirahmiyati2@gmail.com, rezagtlo@gmail.com, latudafirman@gmail.com

Abstrak

Keberadaan struktur-struktur atau institusi-institusi politik ditingkat masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif merupakan suatu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa aktifitas-aktifitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan maupun dalam pembangunan politik, maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh partai politik, kelompok kepentingan dan struktur-struktur lainnya dalam infrastruktur politik merupakan wujud dari keikutsertaan rakyat dalam proses politik dalam suatu sistem politik. Untuk itu satu-satunya cara dalam merangsang dan memaksimalkan kemampuan seorang individu dalam berpartisipasi politik dan untuk mencapai kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam pendidikan politik. Pendidikan politik dapat memberikan pemahaman yang luas dan jelas kepada masyarakat seperti yang dikatakan Plato dan Aristoteles bahwa betapa pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk berbagi tipe aktivitas politik untuk meningkatkan partisipasi politik serta memberikan tekanan yang besar kepada para penguasa untuk mendapatkan pendidikan politik agar mereka dapat menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa kecuali. Keberhasilan pendidikan dalam dunia politik dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat. Adapun yang merupakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui pendidikan politik maka partisipasi politik masyarakat akan mengalami peningkatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods). Dari indikator-indikator yang telah diteliti memang pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik, oleh karena itu keikutsertaan mereka dalam kegiatan politik atau pesta demokrasi tersebut harus dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang kehidupan politik, sehingganya keikutsertaan mereka itu bukan hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Perlu kita sadari bahwa proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara instant, demikian pula pendidikan politik tidak akan selesai dalam waktu singkat, butuh proses panjang yang harus dijalani.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Partisipasi Politik, Pemilu.

PENDAHULUAN

Hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik dan interaksi satu sama lain dari

dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Karena itu semua orang

disebut politis meski hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan aktifitas politik. (Gustomy, 2017)

Keberadaan struktur-struktur atau institusi-institusi politik ditingkat masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif merupakan suatu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik. (Tabo, 2021) Dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa aktifitas-aktifitas politik pemerintah dengan serta merta, secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak terhadap kehidupan rakyat secara keseluruhan maupun dalam pembangunan politik, maka keterlibatan rakyat adalah suatu kelaziman. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh partai politik, kelompok kepentingan dan struktur-struktur lainnya dalam infrastruktur politik merupakan wujud dari keikutsertaan rakyat

dalam proses politik dalam suatu sistem politik. (Alamri et al., 2024)

Dalam mencapai suatu kehidupan dan tatanan masyarakat yang demokratis dan terorganisir sesuai dengan cita-cita bangsa dan tujuan bernegara yang tidak menerapkan politik praktis sangatlah ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, mengingat pemerintah yang sebenarnya ada ditangan rakyat. (Husin et al., 2023) sehingga keikutsertaan, peran serta, penggabungan diri dan pengambilan bagian berpolitik yang disebut dengan partisipasi politik sangatlah perlu dalam memecahkan konflik-konflik dan gejolak politik dan untuk mengetahui konsep-konsep dan perkembangan kehidupan politik negara tersebut. Partisipasi politik masyarakat tidak hanya berkaitan dengan implementasi sebuah kebijakan ataupun proyek pembangunan melainkan mulai dari perencanaan, implementasi hingga proses monitoring dan evaluasi. Partisipasi masyarakat

merupakan keterlibatan secara langsung dalam aktifitas penyelenggaraan negara yang terhubung dengan kepentingan masyarakat dan tidak hanya dilakoni oleh mereka yang duduk dilembaga-lembaga pemerintah. (Arniti, 2020)

Namun demikian, permasalahan yang dihadapi sekarang ini adalah kurangnya partisipasi politik masyarakat karena pemahaman tentang politik masih sangat rendah. Tidak semua orang mau berpartisipasi dalam politik, dalam kenyataannya hanya sedikit orang yang mau berpartisipasi aktif dan lebih besar jumlah orang yang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perlu diperhatikan bahwa tanpa partisipasi politik maka kehidupan politik akan mengalami kemacetan. (Kusmanto, 2013)

Untuk itu satu-satunya cara dalam merangsang dan memaksimalkan kemampuan

seorang individu dalam berpartisipasi politik dan untuk mencapai kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain dalam pendidikan politik. Pendidikan politik dapat memberikan pemahaman yang luas dan jelas kepada masyarakat seperti yang dikatakan Plato dan Aristoteles bahwa betapa pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk berbagi tipe aktivitas politik untuk meningkatkan partisipasi politik serta memberikan tekanan yang besar kepada para penguasa untuk mendapatkan pendidikan politik agar mereka dapat menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golongan masyarakat tanpa kecuali. Keberhasilan pendidikan dalam dunia politik dapat dilihat pada tingkat partisipasi masyarakat. (Suharyanto, 2014)

Situasi politik dinegara berkembang sama seperti premis dari Profesor Samuel Huntington

dalam bukunya *Political Order on the Changing Society*, bahwa pada akhirnya pilihannya adalah partisipasi atau penguatan kelembagaan politik. Soekarno pada tahap pertama memilih kelembagaan dengan akibat pembusukan lembaga. (Perangin-angin & Zainal, 2018) Dan akhirnya memilih kelembagaan dengan akibat pembusukan partisipasi dan lembaga karena adanya personifikasi negara. Soeharto secara tegas memilih kelembagaan sejak awal, namun karena kelewatan yang terjadi adalah pembusukan partisipasi dan akhirnya terjadi eksplosif, dan membusukan seluruh sistem politik. Habibie secara tradisional berusaha mentransformasikan yang *institutional heavy* ke *participation heavy* namun hasilnya juga tidak ada. Abdurrahman Wahid berusaha membangun partisipasi namun mengabaikan kelembagaan. Megawati berusaha menyeimbangkan antara partisipasi dengan kelembagaan namun dengan

bahan baku dan kecakapan yang terbatas maka hasilnya tidak optimal, sama halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang belum juga bisa menyeimbangkan antara partisipasi dengan kelembagaan, dan di era presiden Jokowi juga menerapkan sama dengan presiden sebelumnya. (Nurgiansah, 2021) Dalam kehidupan masyarakat, jumlah dari kemajuan tiap kali bukanlah akumulasi prestasi, tapi hasil akhir atau kondisi terakhir, kondisi akhir kita ialah ketidakpastian yang disebabkan oleh lemahnya kelembagaan politik dan lemahnya partisipasi politik, sebuah kelembagaan yang didasari bukan oleh frekuensi melainkan kualitas. (Suharyanto, 2016)

Ketika perkembangan partisipasi bergerak dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, pengelolaan, proses partisipatif menjadi semakin rumit dan

memerlukan berbagai jenis kecakapan, pengetahuan kepemimpinan dan kemampuan manajerial. (Nuna & Moonti, 2019) Masalah lemahnya kecakapan partisipatif pada berbagai tingkatan merupakan pokok permasalahan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat. (Sukri, 2020)

Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (Public Policy). Kegiatan yang dimaksud mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan

sebagainya. (Averus & Alfina, 2020)

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Konsep tersebut memiliki beberapa aspek definisi inti yaitu : *Pertama*, ia mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sikap-sikap. *Kedua*, yang menjadi perhatian adalah kegiatan politik warga negara preman, atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman. Dengan demikian terdapat garis antara partisipasi-partisipasi politik dan orang-orang profesional dibidang politik. *Ketiga*, yang menjadi pokok perhatian hanyalah kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. (Nur Wardhani, 2018)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada hakekatnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan ilmiah baik untuk mengumpulkan data hingga pada penarikan kesimpulan. Dalam kaitannya dengan sifat penelitian maka peneliti lebih berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data dan data presentasi (Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods)) dilapangan untuk disajikan dan dianalisa sesuai dengan fakta-fakta dan sifat-sifat populasi secara faktual dan sistematis. Dengan demikian maka penelitian ini disebut penelitian yang bersifat deskriptif.(Adhi Kusumawati, 2019)

Dengan kata lain, penelitian deskriptif berupaya mengalihkan suatu kesan terhadap sesuatu melalui panca indra dengan menuangkan dalam bentuk tulisan, baik kondisi awal, saat

proses sampai akhir, dari sesuatu yang diamati.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Secara umum, pendidikan sangat mempengaruhi proses kehidupan politik, tinggi rendahnya pengaruh pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi dapat dilihat pada hasil penelitian berikut. Pendidikan politik disini hanya di batasi pada hal-hal yang langsung bisa kita amati atau kita lihat secara langsung hasilnya. Artinya seseorang yang sudah memiliki pendidikan politik mempunyai kebijaksanaan yang tinggi dalam menentukan arah serta tujuan bersama organisasi, berpolitik dengan menerapkan arti politik yang sesungguhnya akan membawa sistem perpolitikan kita kearah yang lebih dewasa.(Kiftiyah, 2019)

Dalam negara-negara demokrasi umumnya dianggap

bahwa lebih tinggi partisipasi masyarakat maka akan lebih baik. Dalam alam pemikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaiknya, tingkat partisipasi yang rendah di anggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga Negara yang tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dan dikhawatirkan juga kurang banyak pendapat yang di kemukakan, maka pimpinan Negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa

kelompok saja.(kharisma dwira, 2014)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan proses yang wajar, jika terjadi konflik di anggap partai politik dapat mengatasinya. Proses seseorang dalam memperoleh sikap orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada, mencari dan mengajak orang untuk berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Hal ini dapat kita lihat pada tabel hasil penelitian berikut ini :

Tabel 1.1
Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengaruh Keanggotaan Partai Politik Dalam Partisipasi Politik

Jawaban	Responden	Presentase %
Sangat Berpengaruh	9	21,96
Berpengaruh	25	60,97
Cukup Berpengaruh	7	17,07
Tidak Berpengaruh	-	-

Sangat Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	41	100

Sumber Data : Hasil Penelitian

Hasil tabel diatas tentang tingkat pengaruh keanggotaan partai politik dalam partisipasi politik di Kabupaten Gorontalo, dari 41 responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh sebanyak 9 orang atau 21.96 %, yang memberikan jawaban berpengaruh sebanyak 25 orang atau 60.97 %, sedangkan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 7 orang atau 17.07 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keanggotaan partai politik berpengaruh pada peningkatan partisipasi politik, mereka beranggapan bahwa seseorang yang masuk menjadi anggota partai ini dapat meningkatkan partisipasi politik

dalam hal dapat mengajak para pendukungnya untuk ikut dalam pemilihan, dan ini semata-mata untuk kepentingan bersama. Ini berarti bahwa untuk menjadi anggota partai politik akan meningkatkan partisipasi politik. Akan tetapi untuk menjadi anggota partai itu tidak mudah, selain mempunyai pengetahuan tentang partai politik, mampu menjaga nama baik partai politik, dan lain-lain. Apalagi jika kita ingin mencoba menjadi calon anggota legislatif, disini kontribusi dari pada anggota untuk ikut berpartisipasi politik membutuhkan perjuangan untuk bisa mewujudkan tujuan dari pada partai politik dan tujuan individu.(Priandi & Roisah, 2019)

Tabel 1.2

Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap Peningkatan Partisipasi Politik

Jawaban	Responden	Presentase %
Sangat Berpengaruh	7	17,07
Berpengaruh	28	68,29
Cukup Berpengaruh	6	14,64
Tidak Berpengaruh	-	-
Sangat Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	41	100

Sumber Data : Hasil Penelitian

Hasil tabel diatas tentang tingkat pengaruh pendidikan pelatihan terhadap peningkatan partisipasi politik di Kabupaten Gorontalo, dari 41 responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh sebanyak 7 orang atau 17.07 %, yang memberikan jawaban berpengaruh sebanyak 28 orang atau 68.29 %, sedangkan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 6 orang atau 14.64 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap

peningkatan partisipasi politik. Mereka beranggapan bahwa suatu proses yang dilaksanakan secara formal untuk memberikan pemahaman tentang politik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. (Liando, 2016)

Pendidikan dan pelatihan sangatlah perlu didalam membentuk karakter atau pola pikir dari pada masyarakat dalam mengasah kemampuan untuk menambah kapasitas intelektual masyarakat terhadap partisipasi politik.

Tabel 1.3
Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengaruh
Kampanye Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Jawaban	Responden	Presentase %
Sangat Berpengaruh	25	60,97
Berpengaruh	10	24,39
Cukup Berpengaruh	6	14,64
Tidak Berpengaruh	-	-
Sangat Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	41	100

Sumber Data : Hasil Penelitian

Hasil tabel diatas tentang tingkat pengaruh kampanye dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Gorontalo, dari 41 responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh sebanyak 25 orang atau 60.97 %, yang memberikan jawaban berpengaruh sebanyak 10 orang atau 24.39 %, sedangkan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 6 orang atau 14.64 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aktivitas kampanye sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik.

Kampanye disini bukan hanya memberikan janji palsu kepada publik akan tetapi kampanye disini dapat membantu publik untuk bisa memahami karakter calon dan tujuan dari pada partai politik itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa kampanye dalam hal ini termasuk instrument tempat bersaing antara politisi dan calon pimpinan nasional dalam meraih dukungan suara pada pemilu. Harapan ideal adalah dengan kampanye massa akan memperoleh pendidikan dan kesadaran baru terkait dengan pengelolaan negara dan

perbaikan nasib bangsa kedepan.(Akmal & Salman, 2015).

Tabel 1.4
Tanggapan Responden Terhadap Tingkat Pengaruh Keikutsertaan Dalam Pemilihan Umum Terhadap Partisipasi Politik

Jawaban	Responden	Presentase %
Sangat Berpengaruh	9	21,96
Berpengaruh	31	75,61
Cukup Berpengaruh	1	2,43
Tidak Berpengaruh	-	-
Sangat Tidak Berpengaruh	-	-
Jumlah	41	100

Sumber Data : Hasil Penelitian

Hasil tabel diatas tentang tingkat pengaruh keikutsertaan dalam pemilihan umum terhadap partisipasi politik di Kabupaten Gorontalo, dari 41 responden yang memberikan jawaban sangat berpengaruh sebanyak 9 orang atau 21.61 %, yang memberikan jawaban berpengaruh sebanyak 31 orang atau 75.61 %, sedangkan yang memberikan jawaban cukup baik hanya 1 orang atau 2.43 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ikut dalam pemilihan umum dapat meningkatkan partisipasi politik.

Dengan ikut dalam pemilihan umum ini dapat meningkatkan partisipasi politik, ini menyangkut siapa yang akan memimpin daerah.(Gustomy, 2017)

Karena pemilihan umum dalam hal ini pemungutan suara adalah bentuk partisipasi terkecil yang mudah dilakukan oleh masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan suara dapat meningkatkan partisipasi politik.

Tabel 1.5
Tanggapan Responden Terhadap Keikutsertaan
Anggota Masyarakat Dalam Partisipasi Politik

Jawaban	Responden	Presentase %
Sangat Baik	6	14,64
Baik	28	68,29
Cukup Baik	7	17,07
Tidak Baik	-	-
Sangat Tidak Baik	-	-
Jumlah	41	100

Sumber Data : Hasil Penelitian

Hasil tabel diatas tentang tingkat pengaruh keikutsertaan anggota masyarakat dalam partisipasi politik di Kabupaten Gorontalo, dari 41 responden yang memberikan jawaban sangat baik sebanyak 6 orang atau 14.64 %, yang memberikan jawaban baik sebanyak 28 orang atau 68.29 %, sedangkan yang memberikan jawaban cukup baik sebanyak 7 orang atau 17.07 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses demokrasi dapat meningkatkan partisipasi politik.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.(Alamri et al., 2024)

Suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku

warga Negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan presentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah warga Negara yang berhak memilih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi partai politik berpengaruh dalam lambatnya sebuah proses politik di Kabupaten Gorontalo. Sehingga dalam sebuah proses demokrasi partai politik seharusnya telah mempersiapkan semuanya guna menghadapi pesta demokrasi. (Kusmanto, 2013)

KESIMPULAN

Pendidikan politik disini hanya dibatasi pada hal-hal yang langsung bisa kita amati atau kita lihat secara langsung hasilnya. Artinya seseorang yang sudah memiliki pendidikan politik mempunyai kebijaksanaan yang tinggi dalam menentukan arah serta tujuan bersama organisasi, berpolitik dengan menerapkan arti politik yang sesungguhnya

akan membawa sistem perpolitikan kita kearah yang lebih dewasa.

Dari indikator-indikator yang telah diteliti memang pendidikan politik dapat meningkatkan partisipasi politik, oleh karena itu keikutsertaan mereka dalam kegiatan politik atau pesta demokrasi tersebut harus dilandasi dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang kehidupan politik, sehingga keikutsertaan mereka itu bukan hanya karena ingin ikut-ikutan saja. Perlu kita sadari bahwa proses pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara instant, demikian pula pendidikan politik tidak akan selesai dalam waktu singkat, butuh proses panjang yang harus dijalani.

Dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada sebuah pesta demokrasi pasti banyak hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan sekaligus pendukung

dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumawati. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. I. Sukarno (ed.); 1st ed.). Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Akmal, F., & Salman, A. (2015). Partisipasi Politik Belia Secara "Online" Melalui Ruang Demokrasi Maklumat Media Baru. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication Jilid*, 31(1), 81-100.
- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., Tabo, S., Gorontalo, U., & Politik, P. (2024). *Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial*. 3.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal MODERAT*, 6(3), 591-605.
- Gustomy, R. (2017). Partisipasi Politik Difabel Di 2 Kota. *IJDS : Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 51-62. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.004.01.8>
- Husin, W. L., Arsjad, M. F., & Tabo, S. (2023). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. *Journal Governance and ...*, 3, 63-75. <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/view/311%0Ahttps://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/download/311/270>
- kharisma dwira. (2014). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Ejournal Unsrat*, 1(7), 1144.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan Dalam Partisipasi Politik Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.874>
- Kusmanto, H. (2013). *Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat*, 1(1), 39-47. 1(1), 39-47.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14-28.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>

- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupii.s.v10i1.8407>
- Nurgiansah, T. H. (2021). Political Participation of the Sleman Community in the Covid-19 Pandemic Period in the Context of Citizenship Education. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1), 1-9. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/14994>
- Perangin-angin, L. L. K., & Zainal, M. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Bingkai Jejaring Sosial Di Media Sosial. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 737. <https://doi.org/10.24329/aspi.kom.v3i4.210>
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.106-116>
- Suharyanto, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 151-160.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>
- Sukri, M. A. (2020). Dinasti Politik di Banten : Familisme , Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(2), 169-190.
- Tabo, S. (2021). Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo. [Http://journal.lldikti9.id/Sosiosains](http://journal.lldikti9.id/Sosiosains), 2, 139-152. <http://journal.lldikti9.id/sosiosains/article/view/632/462>